

Dinamika Praktek Ekonomi dan Perdagangan Pada Masa Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Utsmani

Miftah Khoir¹⁾, Aufa Hikmah Al Kholidah²⁾

Universitas Koperasi Indonesia ^{1) 2)}

Email: miftahkhoir58@gmail.com ¹⁾, aufahikmahalkholidah@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Kajian ini menelaah dinamika praktik perekonomian dan perdagangan yang berkembang pada tiga masa kekhalifahan Islam, yaitu Daulah Bani Umayyah (661-750 M), Daulah Bani Abbasiyah (750-1258 M), dan Kesultanan Turki Utsmani (1299-1924 M). Melalui penerapan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian historis, studi ini menyoroti transformasi sistem ekonomi yang mencakup aspek kebijakan moneter, fiskal, serta jaringan perdagangan pada setiap periode. Temuan penelitian mengungkap adanya kesinambungan dalam penggunaan mata uang berbasis logam mulia dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di ketiga kekhalifahan. Namun, masing-masing periode menunjukkan karakteristik ekonomi yang berbeda: era Umayyah ditandai oleh konsolidasi administrasi dan standarisasi mata uang, periode Abbasiyah mencatat kemajuan dalam inovasi keuangan serta integrasi dengan pasar global, sedangkan masa Utsmani diwarnai oleh penerapan model ekonomi terpusat yang bersifat komando. Perbedaan model pengelolaan ekonomi tersebut turut dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, perkembangan teknologi, serta konteks global yang dihadapi oleh masing-masing kekhalifahan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Perdagangan, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, Sejarah Ekonomi, Komparasi Dinasti.

ABSTRACT

This study examines the dynamics of economic and trade practices that developed during the three periods of Islamic caliphate, namely the Umayyad Caliphate (661-750 AD), the Abbasid Caliphate (750-1258 AD), and the Ottoman Empire (1299-1924 AD). Through the application of a qualitative approach with historical research methods, this study highlights the transformation of the economic system, covering aspects of monetary and fiscal policy, as well as trade networks in each period. The findings reveal continuity in the use of precious metal-based currencies and the application of sharia economic principles in the three caliphates. However, each period exhibits distinct economic characteristics: the Umayyad era was marked by administrative consolidation and currency standardization, the Abbasid period saw advancements in financial innovation and integration with global markets, while the Ottoman era was characterized by the implementation of a centralized command-based economic model. The differences in these economic management models were also influenced by political factors, technological developments, and the global context faced by each caliphate.

Keywords: Islamic Economy, Trade, Umayyad Dynasty, Abbasid Dynasty, Ottoman Empire, Economic History, Dynasty Comparison.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan perdagangan merupakan aspek fundamental untuk memahami kemajuan dan stabilitas suatu peradaban. Dalam sejarah dunia Islam, periode Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani menjadi fase penting yang tidak hanya mencerminkan kekuatan politik dan militer, tetapi juga transformasi mendalam dalam praktik ekonomi dan jaringan perdagangan. Ketiga dinasti ini berperan sebagai penggerak utama dalam menghubungkan berbagai wilayah di Asia, Afrika, dan Eropa melalui jalur perdagangan yang kompleks serta mengembangkan sistem ekonomi yang mampu menopang struktur sosial dan pemerintahan yang luas (Kuran, 2018). Oleh karena itu, pemahaman mendetail tentang dinamika ekonomi dan perdagangan pada masa-masa ini sangat penting untuk menilai kontribusi peradaban Islam terhadap sejarah ekonomi global.

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah mengenai bagaimana praktik ekonomi dan perdagangan berkembang dan berbeda di antara ketiga dinasti tersebut. Pada masa Bani Umayyah (661-750 M), prinsip sentralisasi dan ekspansi wilayah memungkinkan terbentuknya jaringan perdagangan yang strategis, seperti rute Jalur Sutra dan Jalur Laut Tengah, yang selaras dengan kebijakan politik yang mengutamakan perluasan wilayah dan stabilitas administratif (Heck, 2006). Selanjutnya, Bani Abbasiyah (750-1258 M) dikenal dengan inovasi institusional di bidang ekonomi, seperti pembentukan pasar modal, sistem perpajakan yang terstruktur, dan kemajuan teknik moneter seperti penggunaan dinar emas yang luas di kawasan yang luas, yang turut mendorong perkembangan urbanisasi dan aktivitas perdagangan sehingga lanskap ekonomi menjadi lebih kompleks dan terintegrasi (Udovitch, 1970). Di sisi lain, masa Turki Utsmani (1299-1924 M) menunjukkan adaptasi dan transformasi praktik ekonomi dengan mengintegrasikan tradisi ekonomi Islam dengan sistem administrasi modern yang didukung oleh reformasi Tanzimat, teknologi baru, serta pengaruh global yang semakin intens, menjadikan Utsmani sebagai jembatan ekonomi antara Timur dan Barat (İnalçık, 1994).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh dan analisis komparatif mengenai dinamika praktik ekonomi dan perdagangan pada masa ketiga dinasti tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal, seperti kondisi politik, inovasi teknologi, dan konteks sosial yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan jaringan perdagangan secara signifikan. Melalui pendekatan historis-kualitatif yang menelaah sumber primer seperti manuskrip ekonomi dan dokumen administrasi, serta kajian literatur ilmiah terkini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kajian sejarah ekonomi Islam yang selama ini kurang mendapat perhatian mendalam, khususnya dalam konteks perbandingan antar dinasti besar Islam (Faroqhi, 1984).

Selain itu, analisis komparatif ini akan mengungkap pola-pola kontinuitas dan perubahan dalam sistem ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, serta peran negara dan institusi ekonomi lainnya. Temuan yang dihasilkan juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana praktik ekonomi masa lalu dapat memberikan pelajaran penting untuk konstruksi ekonomi modern di negara-negara Islam dan kawasan sekitarnya. Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat saat ini, meninjau kembali sejarah ekonomi dan perdagangan pada masa kejayaan dunia Islam adalah relevan untuk memahami kontribusi

peradaban Islam dalam sejarah ekonomi dunia dan sebagai bahan refleksi bagi pengembangan ekonomi masa depan (Kuran, 2018).

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berupaya menjelaskan kajian historis mengenai ekonomi dan perdagangan dari sudut pandang akademis, tetapi juga berusaha menghubungkan temuan tersebut dengan konteks ekonomi kontemporer yang menjadikan kajian ini relevan bagi para akademisi, ekonom, dan sejarawan modern.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang di dalamnya menggunakan metode historis guna menganalisis dinamika praktik perekonomian dan perdagangan pada periode Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan-bahan primer dan sekunder terkait, meliputi naskah-naskah ekonomi kuno, dokumen-dokumen administrasi, serta berbagai literatur ilmiah terpercaya yang mengkaji aspek ekonomi dari ketiga kekhalifahan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis perbandingan (*comparative analysis*). Analisis isi bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam dari berbagai teks sejarah, sedangkan analisis perbandingan berfungsi untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta pola transformasi sistem ekonomi di antara ketiga periode yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menyusun kembali perkembangan ekonomi Islam secara sistematis dan kritis dalam sebuah perspektif sejarah yang berkesinambungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kondisi Ekonomi dan Sistem Perdagangan

Masa Daulah Bani Umayyah Masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah menandai fase penting dalam pembentukan struktur ekonomi Islam yang kuat dan terorganisir. Sistem ekonomi pada periode ini dibangun di atas upaya konsolidasi yang luas terhadap kekayaan hasil ekspansi militer, sekaligus penataan ulang sistem keuangan warisan kekaisaran sebelumnya seperti Bizantium dan Sassania. Pusat pemerintahan di Damaskus menjadi basis pengendali kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan lintas wilayah. Pemerintahan Umayyah tidak hanya mewarisi wilayah yang luas, tetapi juga kompleksitas sistem ekonomi yang berbeda-beda. Karena itu, mereka mengarahkan fokus pada pembentukan sistem keuangan yang seragam, stabil, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu tonggak utama dalam sejarah ekonomi Islam adalah reformasi moneter besar-besaran di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685–705 M). Pada tahun 697 M, beliau mengeluarkan kebijakan pencetakan mata uang Islam standar berupa dinar emas dan dirham perak dengan berat dan kadar kemurnian yang seragam. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menstabilkan transaksi ekonomi, tetapi juga mempertegas identitas politik dan religius umat Islam. Koin tersebut menampilkan kalimat tauhid sebagai pengganti gambar manusia atau penguasa, yang sebelumnya menjadi ciri khas mata uang Romawi dan Persia. Langkah ini merupakan bentuk “revolusi moneter” yang mengangkat nilai-nilai tauhid ke dalam ranah ekonomi sekaligus memperkuat legitimasi kekuasaan khalifah sebagai pemimpin dunia Islam. (Heck, 2006).

Penerapan standar moneter ini menciptakan stabilitas nilai tukar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pedagang lintas wilayah terhadap sistem keuangan Islam. Dalam waktu singkat, dinar dan dirham Umayyah menjadi mata uang internasional yang digunakan dalam perdagangan di kawasan Mediterania, Timur Tengah, dan Asia Barat, menggantikan dominasi solidus Bizantium. Stabilitas moneter ini juga memudahkan transaksi antarwilayah yang sebelumnya terkendala perbedaan mata uang dan fluktuasi harga logam mulia.

Dari aspek fiskal dan administrasi, Bani Umayyah memperkenalkan birokrasi yang efisien melalui lembaga Diwan al-Kharaj, semacam kementerian yang mengatur pajak bumi dan pendapatan negara. Lembaga ini melakukan sensus penduduk dan survei tanah (musaqqafat) untuk menilai produktivitas lahan pertanian dan menetapkan pajak secara proporsional. Tanah yang diperoleh melalui penaklukan disebut *ard al-kharaj*, dikenai pajak tetap, sedangkan tanah milik kaum Muslim disebut *ard al-'ushr*, hanya dikenakan zakat dengan tarif yang lebih ringan. Kebijakan ini menunjukkan adanya sistem perpajakan yang relatif adil serta berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.

Walaupun demikian, sistem ini tidak lepas dari ketegangan sosial, khususnya antara penduduk Muslim Arab dan mawali (non-Arab Muslim). Kaum mawali kerap mengeluhkan ketidakadilan fiskal, karena beban pajak yang masih dianggap berat bagi kelompok non-Arab. Namun, secara umum kebijakan agraria dan fiskal Umayyah terbukti efektif meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah subur seperti Mesopotamia, Syam, dan Mesir, yang kemudian menjadi tulang punggung pendapatan negara.

Selain itu, Bani Umayyah juga membangun jaringan perdagangan trans-kontinental yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Mereka menghidupkan kembali Jalur Sutra darat yang menghubungkan Tiongkok dan Asia Tengah dengan wilayah Mediterania, serta mengembangkan jalur laut yang melintasi Teluk Persia dan Samudra Hindia hingga ke pantai Afrika Timur. Kota Damaskus tumbuh menjadi pusat industri dan perdagangan, sementara Basra dan Pelabuhan Aden berperan sebagai simpul utama aktivitas ekspor-impor ke wilayah India dan Cina. Aktivitas perdagangan ini menciptakan aliran barang dan komoditas bernilai tinggi, seperti tekstil, logam, dan rempah-rempah, yang memperkaya kas negara dan memperkuat jaringan ekonomi dunia Islam.

Untuk menjamin kelancaran perdagangan tersebut, pemerintahan Umayyah menempatkan pos-pos militer dan garnisun di sepanjang rute dagang strategis guna melindungi para pedagang dari perampokan dan gangguan keamanan. Di sisi lain, armada laut Islam yang kuat berfungsi menjaga stabilitas di wilayah perairan Laut Tengah dan Samudra Hindia. Kebijakan keamanan ini menciptakan kondisi perdagangan yang aman dan stabil, yang kemudian dikenal sebagai periode “*Pax Islamica*”, yaitu masa di mana kegiatan ekonomi dan pertukaran budaya dapat berkembang pesat tanpa gangguan berarti.

Dari keseluruhan aspek tersebut, sistem ekonomi Daulah Bani Umayyah menampilkan perpaduan antara nilai-nilai syariah, efisiensi administrasi, dan kebijakan ekonomi yang adaptif terhadap realitas geopolitik. Melalui penerapan mata uang standar, pembenahan sistem perpajakan, serta pembentukan jaringan perdagangan lintas benua, kekhalifahan ini berhasil menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Walaupun menghadapi dinamika sosial dan politik internal, kebijakan ekonomi pada masa Umayyah telah menjadi pondasi yang kokoh bagi perkembangan ekonomi Islam di periode-periode

berikutnya, terutama pada masa Bani Abbasiyah yang mewarisi sekaligus menyempurnakan sistem tersebut. (Heck, 2006).

Dinamika Perkembangan Ekonomi dan Perdagangan Masa Bani Abbasiyah

Masa Daulah Bani Abbasiyah (750–1258 M) merupakan puncak kejayaan ekonomi, intelektual, dan kebudayaan dalam sejarah Islam. Pada periode ini, sistem ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen penggerak inovasi sosial, teknologi, dan keuangan. Pergeseran ibu kota dari Damaskus ke Baghdad pada tahun 762 M membawa dampak luar biasa terhadap perkembangan ekonomi dunia Islam. Secara geografis, Baghdad terletak di titik strategis antara Sungai Tigris dan Efrat, menjadikannya pusat transit perdagangan internasional yang menghubungkan Timur dan Barat. Kota ini dirancang secara simetris dan berlapis, mencerminkan tatanan sosial-ekonomi yang terorganisir serta fungsi administratif yang efektif dalam mengatur arus barang dan modal.

Keputusan untuk membangun Baghdad bukan sekadar langkah politik, melainkan juga strategi ekonomi jangka panjang. Lokasinya yang dekat dengan jalur perdagangan utama memungkinkan kontrol atas rute darat Jalur Sutra sekaligus jalur laut melalui Teluk Persia menuju India dan Cina. Akibatnya, Baghdad dengan cepat menjelma menjadi kota kosmopolitan yang menjadi pusat ekonomi dunia Islam. Pedagang dari berbagai bangsa, seperti Persia, Arab, Turki, India, dan bahkan Eropa, berinteraksi di pasar-pasar Baghdad. Kehidupan ekonomi di kota ini mencerminkan tingkat integrasi pasar global yang luar biasa pada masa itu.

Salah satu aspek paling menonjol dalam ekonomi Abbasiyah adalah kemajuan lembaga keuangan. Pada masa ini, para jahabidhah (penukar uang) tidak lagi sekadar berfungsi sebagai money changer, tetapi telah berkembang menjadi bankir komersial yang melayani simpanan, kredit, serta transfer dana antarwilayah. Mereka menjadi pelopor dalam memperkenalkan sistem keuangan berbasis kepercayaan dan surat jaminan.

Inovasi penting yang muncul adalah penggunaan sakk (cek) dan suftajah (surat kredit) sebagai instrumen pembayaran. Dua sistem ini memungkinkan pedagang melakukan transaksi dalam jarak jauh tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar, sehingga mengurangi risiko perampokan di jalur dagang. Instrumen tersebut dapat dianggap sebagai cikal bakal sistem perbankan syariah modern, karena berlandaskan prinsip keadilan dan kepercayaan antar pihak yang bertransaksi.

Selain itu, praktik pembiayaan mudharabah (bagi hasil) dan musharakah (kemitraan modal) menjadi landasan penting bagi kegiatan perdagangan skala besar. Kedua bentuk kontrak tersebut memungkinkan pemilik modal dan pengusaha berbagi keuntungan dan risiko secara adil, tanpa praktik riba. Dengan cara ini, aktivitas ekonomi menjadi inklusif dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas (Udovitch, 1970).

Kemajuan ekonomi Abbasiyah juga ditopang oleh revolusi pertanian yang dikenal dengan istilah Arab Agricultural Revolution. Melalui penguasaan teknologi irigasi dan sistem pertanian yang maju, produksi pangan meningkat secara signifikan. Berbagai jenis tanaman baru seperti kapas, tebu, jeruk, dan padi diperkenalkan melalui proses pertukaran lintas budaya yang melibatkan wilayah Persia, India, dan Cina. Hal ini memperluas basis produksi ekonomi dan meningkatkan diversifikasi hasil pertanian.

Perkembangan sektor pertanian tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga memunculkan industri manufaktur di perkotaan. Salah satu pencapaian

monumental adalah ditemukannya industri kertas di Samarkand setelah peristiwa Perang Talas (751 M), ketika tawanan Cina memperkenalkan teknik pembuatan kertas kepada umat Islam. Teknologi ini kemudian diadaptasi dan disempurnakan di Baghdad, menghasilkan produksi kertas massal yang berbiaya murah. Akibatnya, kegiatan administrasi, pendidikan, dan penyebaran ilmu pengetahuan mengalami kemajuan pesat (Watson, 1983).

Dengan biaya produksi dokumen yang semakin rendah, muncul pula lembaga-lembaga pendidikan dan perpustakaan besar seperti Bayt al-Hikmah, yang menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu. Ketersediaan kertas yang murah dan melimpah juga memicu pertumbuhan sektor percetakan dan penyalinan manuskrip, mempercepat penyebaran ide dan inovasi ekonomi di seluruh dunia Islam.

Abbasiyah menciptakan jaringan perdagangan global awal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam. Dengan posisi geografis yang strategis, Baghdad berfungsi sebagai pusat dari sistem ekonomi yang menghubungkan wilayah Skandinavia hingga Afrika Timur. Komoditas dari berbagai wilayah — seperti bulu dan amber dari Eropa Utara, rempah-rempah dari Kepulauan Maluku, tekstil dari India, dan sutera dari Cina — bertemu di pasar Baghdad.

Kondisi ini menjadikan Baghdad sebagai kota dengan tingkat globalisasi ekonomi tertinggi di dunia abad pertengahan. Pasar di kota tersebut tidak hanya menjadi tempat jual beli barang, tetapi juga arena pertukaran informasi, inovasi teknologi, serta budaya. Harga-harga komoditas di Baghdad sering kali menjadi acuan pasar di kawasan lain, karena besarnya pengaruh ekonomi kota ini terhadap arus perdagangan dunia.

Abbasiyah juga mengembangkan sistem infrastruktur yang mendukung perdagangan, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan kanal. Infrastruktur tersebut mempermudah mobilitas barang dan orang, serta memperkuat kontrol negara terhadap arus ekonomi lintas wilayah. Dengan demikian, periode Bani Abbasiyah menandai transformasi ekonomi Islam dari sistem tradisional menjadi ekonomi yang lebih kompleks dan terintegrasi secara global (Udovitch, 1970; Watson, 1983).

Transformasi dan Inovasi dalam Praktek Ekonomi dan Perdagangan Masa Turki Utsmani

Kekhalifahan Turki Utsmani (1299–1924 M) menandai fase baru dalam evolusi ekonomi Islam, dengan struktur ekonomi yang semakin kompleks dan terpusat. Setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 M, kekuasaan Utsmani bukan hanya memperluas pengaruh politik dan militer, tetapi juga menguasai pusat perdagangan strategis yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Penguasaan atas wilayah tersebut menjadikan Turki Utsmani sebagai pengendali utama jalur perdagangan internasional antara Timur dan Barat, terutama di kawasan Laut Tengah dan Laut Hitam.

Model ekonomi Utsmani memiliki karakter komando dan birokratis, di mana negara berperan dominan dalam mengatur produksi, distribusi, dan perdagangan. Berbeda dengan sistem ekonomi Bani Abbasiyah yang relatif terbuka, kebijakan ekonomi Utsmani diarahkan sepenuhnya untuk mendukung kekuatan militer dan menjaga stabilitas politik kekaisaran. Setiap aktivitas ekonomi pada dasarnya merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat kas negara dan menopang logistik militer.

Salah satu kebijakan ekonomi paling penting adalah penerapan sistem tanah miri, yaitu sistem di mana seluruh tanah dianggap milik negara (Sultan). Tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, tetapi dapat dikelola oleh rakyat dengan izin negara.

Para sipahi (prajurit berkuda) diberi hak untuk mengelola tanah sebagai imbalan atas jasa militer mereka. Mereka menarik pajak dari hasil panen petani dan menyerahkan sebagian besar pendapatan tersebut kepada negara. Dengan demikian, sistem ini menciptakan arus pendapatan tetap ke kas kekaisaran sekaligus menjamin loyalitas pasukan terhadap Sultan.

Kebijakan fiskal Utsmani dikelola oleh pejabat keuangan tinggi yang disebut Defterdar, yang berfungsi seperti menteri keuangan modern. Ia bertugas mencatat pendapatan dan pengeluaran negara, mengawasi pungutan pajak, dan memastikan stabilitas keuangan kekaisaran. Struktur birokrasi fiskal ini menunjukkan tingkat administrasi ekonomi yang sangat maju dan terorganisir dengan baik.

Selain itu, sistem guild (esnaf/lonca) berfungsi sebagai lembaga ekonomi semi-negara yang mengatur produksi dan perdagangan di kota-kota besar seperti Istanbul, Bursa, dan Izmir. Pemerintah menetapkan standar harga (narh), kualitas produk, serta kuantitas produksi untuk menjamin ketersediaan barang-barang pokok di pasar. Pengawasan ini bertujuan untuk menghindari penimbunan, mencegah monopoli, dan menjaga stabilitas sosial. Namun, regulasi yang sangat ketat ini juga membatasi ruang inovasi dan persaingan pasar, sehingga menurunkan daya saing ekonomi dalam jangka Panjang (İnalcık, 1994).

Kekaisaran Utsmani juga memberlakukan monopoli negara (yed-i vahid) terhadap komoditas strategis seperti sutra, garam, tembakau, dan lilin. Hanya agen resmi kerajaan yang diizinkan memperdagangkan komoditas tersebut. Pendapatan dari sektor ini menjadi sumber keuangan utama untuk membiayai administrasi dan pertahanan negara. Kebijakan ini mencerminkan semangat merkantilisme awal, di mana negara berusaha mempertahankan surplus perdagangan dengan menekan impor barang mewah dari Eropa dan memperluas ekspor produk domestik.

Namun, seiring perkembangan zaman, posisi ekonomi Utsmani mulai melemah. Penemuan rute laut baru ke Asia oleh Vasco da Gama pada tahun 1498 M membuat jalur perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya melewati wilayah Timur Tengah beralih ke rute laut yang dikuasai bangsa Portugis dan Spanyol. Akibatnya, pemasukan dari perdagangan internasional menurun drastis, dan kekaisaran kehilangan kontrol atas salah satu sumber pendapatannya yang utama. Kelemahan ini semakin diperparah oleh munculnya Revolusi Industri di Eropa, yang menghasilkan produk manufaktur lebih murah dan massal. Barang-barang buatan Eropa mulai membanjiri pasar-pasar Utsmani, sementara industri lokal tidak mampu bersaing karena stagnasi teknologi dan regulasi yang membatasi inovasi. Akibatnya, struktur ekonomi Utsmani yang bergantung pada pertanian dan perdagangan tradisional tidak lagi mampu menghadapi dinamika ekonomi global.

Situasi ini diperburuk oleh penerapan kebijakan Capitulations, yaitu perjanjian yang memberikan hak-hak istimewa kepada pedagang Eropa untuk berdagang di wilayah Utsmani tanpa dikenai pajak tinggi. Pada awalnya, kebijakan ini bertujuan menarik kerja sama ekonomi dan diplomatik, tetapi kemudian justru menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap kekuatan asing. Kekaisaran kehilangan kedaulatan finansialnya dan secara bertahap berubah menjadi pasar bagi produk-produk industri Eropa (Britannica, n.d.).

Dengan demikian, sistem ekonomi Turki Utsmani menggambarkan kekuatan negara yang sangat besar dalam mengendalikan sektor ekonomi, tetapi sekaligus menampilkan keterbatasan adaptasi terhadap perubahan global. Ketidaksiapan

menghadapi perkembangan teknologi modern dan perubahan struktur perdagangan internasional menjadi salah satu penyebab utama kemunduran ekonomi dan politik kekaisaran.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Ekonomi dan Perdagangan

Perubahan struktur ekonomi dari masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga Turki Utsmani dipengaruhi oleh sejumlah faktor politik, sosial, dan teknologi yang saling berkaitan.

1. Faktor Politik dan Administrasi

Stabilitas politik memiliki peranan penting dalam menjaga kemajuan ekonomi. Pada masa Bani Umayyah, sistem pemerintahan yang sentralistik mendukung terbentuknya sistem keuangan yang efisien dan stabil. Sementara pada masa akhir Abbasiyah, munculnya dinasti-dinasti kecil seperti Samaniyah, Fatimiyah, dan Umayyah di Andalusia menimbulkan fragmentasi kekuasaan yang berdampak pada melemahnya koordinasi ekonomi antarwilayah. Adapun pada masa Utsmani, sentralisasi kekuasaan yang mutlak di tangan Sultan menciptakan stabilitas politik jangka panjang, namun menekan inisiatif individu dan menghambat pertumbuhan sektor swasta.

2. Faktor Sosial dan Demografi

Keberagaman etnis dan agama merupakan kekuatan sekaligus tantangan bagi ekonomi dunia Islam. Di bawah kekuasaan Abbasiyah dan Utsmani, populasi multietnis seperti Arab, Persia, Turki, Yahudi, dan Kristen menciptakan jaringan perdagangan dan keuangan lintas benua. Kaum Yahudi dan Kristen, dengan jaringan diaspora mereka di luar negeri, memainkan peran *Generated with https://kome.ai* penting dalam transaksi internasional dan perbankan. Selain itu, pada masa Utsmani, kebijakan *devshirme* (rekrutmen anak laki-laki non-Muslim menjadi prajurit elite Janissari) turut mempengaruhi dinamika sosial dan mobilitas ekonomi masyarakat.

3. Faktor Teknologi dan Inovasi

Kemajuan teknologi menjadi pendorong utama perkembangan ekonomi Islam. Pada masa Abbasiyah, kemajuan dalam bidang irigasi, metalurgi, dan navigasi laut sangat mendukung produktivitas pertanian dan perdagangan. Penemuan teknik pembuatan kertas dari Cina juga mempercepat penyebaran pengetahuan dan memperkuat ekonomi berbasis literasi. Sebaliknya, pada masa Utsmani, kegagalan untuk mengadopsi teknologi industri dan mesin uap dari Eropa menyebabkan stagnasi ekonomi dan ketergantungan terhadap produk luar negeri.

Dengan demikian, ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi dunia Islam sangat bergantung pada kemampuan politik, sosial, dan teknologi untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.

Perbandingan dan Kontinuitas Pola Ekonomi

Walaupun setiap kekhalifahan memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, terdapat benang merah kontinuitas dan transformasi yang menghubungkan ketiganya. Dalam hal kontinuitas, semua kekhalifahan Islam mempertahankan sistem moneter

berbasis logam mulia (emas dan perak) serta prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan pentingnya keadilan dalam kontrak ekonomi. Prinsip moral Islam menjadi fondasi dalam mengarahkan kebijakan ekonomi dan transaksi perdagangan di setiap masa pemerintahan.

Namun dari sisi transformasi, terjadi pergeseran paradigma ekonomi. Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, negara berperan sebagai pengatur dan pelindung ekonomi, sedangkan sektor swasta menjadi motor utama pertumbuhan melalui perdagangan dan industri. Sementara pada masa Turki Utsmani, negara menjadi pelaku ekonomi utama melalui sistem etatisme, di mana kontrol atas sumber daya berada sepenuhnya di tangan pemerintah.

Dari segi orientasi perdagangan, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah lebih terbuka terhadap jaringan dagang internasional, menjadikan dunia Islam sebagai poros utama perdagangan global. Sebaliknya, Turki Utsmani lebih berorientasi pada proteksi ekonomi domestik dan mempertahankan stabilitas internal kekaisaran di tengah tekanan ekonomi global.

Implikasi Perkembangan Ekonomi dan Perdagangan bagi Masyarakat dan Politik

Perkembangan sistem ekonomi dan perdagangan dalam tiga kekhalifahan besar Islam membawa dampak sosial dan politik yang signifikan.

1. Implikasi Sosial

Kemakmuran ekonomi, terutama pada masa Bani Abbasiyah, mendorong pembangunan infrastruktur sosial seperti bimaristan (rumah sakit), bayt al-hikmah (perpustakaan dan pusat ilmu), serta madrasah. Ketersediaan fasilitas publik ini meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas akses terhadap pendidikan. Mobilitas sosial menjadi lebih terbuka, karena individu dapat meningkatkan status sosial melalui pendidikan, perdagangan, atau profesi keahlian. Selain itu, kemajuan ekonomi juga menumbuhkan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang menjadi ciri khas peradaban Islam klasik.

2. Implikasi Politik

Kekuatan ekonomi memiliki korelasi langsung dengan stabilitas politik dan kekuasaan militer. Surplus pendapatan negara memungkinkan pembentukan birokrasi profesional dan angkatan bersenjata permanen yang menjaga keamanan dan memperluas wilayah kekuasaan. Pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, kemakmuran ekonomi menjadi fondasi stabilitas pemerintahan. Sementara pada masa Turki Utsmani, kontrol atas jalur perdagangan internasional memberi posisi geopolitik strategis terhadap negara-negara Eropa. Namun, ketika perdagangan global beralih ke jalur laut Atlantik dan industri Eropa berkembang pesat, ekonomi Utsmani melemah dan menyebabkan ketergantungan terhadap pinjaman asing. Akhirnya, kondisi ini mempercepat kemunduran politik dan munculnya istilah “The Sick Man of Europe.” (Britannica, n.d.).

Dengan demikian, dinamika ekonomi dan perdagangan dalam tiga kekhalifahan besar Islam menunjukkan hubungan erat antara kekuatan ekonomi dan ketahanan politik. Ketika ekonomi berkembang, peradaban Islam mencapai kejayaan; sebaliknya, ketika ekonomi melemah dan gagal beradaptasi terhadap perubahan global, maka struktur politik pun ikut runtuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menyeluruh yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa tiga kekhalifahan Islam—Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani—telah membangun sistem ekonomi dan perdagangan dengan ciri khas yang unik sesuai dengan konteks era masing-masing. Bani Umayyah berfungsi sebagai pelopor dengan meletakkan dasar sistem ekonomi Islam yang terorganisir melalui standarisasi mata uang, penataan administrasi fiskal, serta pengembangan jaringan perdagangan antar benua. Capaian ini menciptakan stabilitas ekonomi yang menjadi pondasi bagi kemajuan peradaban Islam berikutnya.

Bani Abbasiyah meneruskan warisan tersebut dengan menghantarkan ekonomi Islam menuju puncak kecemerlangan melalui berbagai terobosan inovatif. Kemajuan dalam sektor keuangan dengan diperkenalkannya instrumen seperti *sakk* dan *suftajah*, revolusi pertanian, serta integrasi pasar global menjadikan periode ini sebagai masa keemasan ekonomi Islam. Baghdad berhasil menempatkan diri sebagai pusat perdagangan dunia yang menyambungkan berbagai wilayah, menciptakan tingkat keterpaduan ekonomi yang belum pernah tercapai sebelumnya.

Sementara itu, Turki Utsmani mengembangkan model ekonomi yang berbeda dengan menerapkan sistem terpusat dan birokratis. Melalui pengendalian ketat terhadap tanah (*miri*), sistem guild, dan monopoli negara, kekaisaran ini berhasil menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Namun, model ini terbukti kurang mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan global, termasuk penemuan rute dagang baru dan Revolusi Industri di Eropa, yang pada akhirnya turut menyebabkan kemunduran ekonomi kekaisaran.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun terdapat kesinambungan dalam pemakaian mata uang logam mulia dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, ketiga kekhalifahan tersebut mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan ekonomi. Perbedaan ini mencerminkan dinamika sejarah yang kompleks serta kemampuan adaptasi masing-masing institusi politik dalam menanggapi tantangan zaman, sekaligus menunjukkan sumbangsih penting peradaban Islam dalam sejarah ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., Azhar, I., Anggraini, D. T., Zuhra, S., Meutia, T., Roni, A., Annas, M., Sanusi, A., Jalil, F. Y., Holid, A., Rizka, Hidayat, A. D., Maulana, L., Johari, Awa, Zulfidar, F., Solihin, I., Hidayat, & Taqwiem, A. (2024). *Sejarah dan pemikiran ekonomi Islam*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Ashtor, E. (1976). *A social and economic history of the Near East in the Middle Ages*. Princeton University Press.
- Economic development in the Islamic world*. (n.d.). Journal of Economic History. Diakses dari <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-economic-history/article/economic-development-in-the-islamic-world/>
- Ekonomi dan perdagangan pada masa Turki Utsmani*. (n.d.). Al-Dzahab Journal, 1(2). Diakses dari <https://ejournal.tainkerinci.ac.id/index.php/al-dzahab/article/view/4076/1434>
- Farooqi, S. (1984). *Towns and townsmen of Ottoman Anatolia*. Cambridge University Press.

- Heck, G. W. (2006). *The construction of knowledge in Islamic civilization*. Qalam Press.
- İnalçık, H. (1994). *An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300–1914*. Cambridge University Press.
- Ottoman Empire*. (n.d.). Dalam Encyclopædia Britannica. Diakses dari <https://www.britannica.com/place/Ottoman-Empire>
- Perkembangan ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah*. (n.d.). Journal of Islamic Economics and Business, 5(1). Diakses dari <http://www.jurnal.ubs-usg.ac.id/index.php/joeb/article/view/516/748>
- Perkembangan ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah*. (n.d.). Jurnal Ekonomi Islam, 2(1). Diakses dari <https://dlwqtxtslxzle7.cloudfront.net/86638324/45-libre.pdf>
- Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Bani Umayyah*. (2017). Jurnal Pottek Darussalam, 10(1). Diakses dari <http://eprints.polsri.ac.id/5439/2/jurnal%20pottek%20darussalam%20jan-april%202017%20%28Perkembangan%20Pemikiran%20Ekonomi%20Islam%29.pdf>
- Teori ekonomi dan perdagangan Islam*. (n.d.). Journal of Islamic Economics, 8(2). Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/20839053>
- Udovitch, A. L. (1970). *Partnership and profit in medieval Islam*. Princeton University Press.
- Wahidah, R., Istibsyaroh, Muhlis, & Hadi, S. (2025). *Refleksi sejarah peradaban dan pemikiran Islam: Daulah Umayyah, Abbasiyah, dan era kebangkitan Islam*. Penerbit KBM Sastrabook.
- Watson, A. M. (1983). *Agricultural innovation in the early Islamic world: The diffusion of crops and farming techniques, 700–1100*. Cambridge University Press.

